

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, peradilan mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mewedahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang kongkrit. Adanya peradilan tersebut akan terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan-hubungan individual maupun dalam hubungan kelompok sosial kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Pengkajian mengenai peradilan pidana, tak lepas dari pelaksanaannya. Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan disebut dengan sistem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris *Criminal Justice System*.<sup>2</sup> Sistem peradilan pidana disingkat SPP adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>3</sup>

Sistem peradilan pidana diharapkan dapat menanggulangi kejahatan. Namun sebaliknya, kejahatan masih saja terjadi, hal ini dibuktikan dengan

---

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 41.

<sup>2</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung: PT Refika Aditama, hal 4-5.

<sup>3</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hal. 1.

adanya 1.551 tindak pidana sepanjang tahun 2013 Surakarta.<sup>4</sup> Pelaku dan korban tindak pidana bukan hanya orang dewasa bahkan anak. Tercatat oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta pada tahun 2008 sebanyak 109 kasus, tahun 2009 sebanyak 75 kasus, tahun 2010 sebanyak 79 kasus dan tahun 2011 sebanyak 71 kasus.<sup>5</sup> Karena masih adanya anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah membedakan perlakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di dalam hukum acara pidana yang mengupayakan penyelesaian perkara anak di luar peradilan.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Pengaturan pengecualian kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Anak sebagai pelaku tindak pidana lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak. Sedangkan pembedaan ancaman pidana bagi anak

---

<sup>4</sup> JOGLOSEMAR, Rabu, 12 Maret 2014, *Tindak Pidana 2013 Tembus 1.551*, dalam <http://joglosemar.co/2014/03/tindak-pidana-2013-tembus-1-551.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 pukul 19.41 WIB.

<sup>5</sup> Dyah Ayu Qori Fauziah dan Tim Litbang LPM NOVUM FH UNS, Senin, 26 November 2012, *ANAK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA*, dalam [http://qoryayu.blogspot.com/2012/11/v-behavioururldefaultvml0\\_26.html?m=1](http://qoryayu.blogspot.com/2012/11/v-behavioururldefaultvml0_26.html?m=1), diakses pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 pukul 19.45 WIB.

ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimum ancaman pidana yang diterapkan kepada orang dewasa. Penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Unit PPA Polresta Surakarta pada tahun 2013 menangani tindak pidana kesusilaan yang berkaitan dengan anak sebanyak 18 kasus yang meliputi tindak pidana perkosaan, cabul, penganiayaan anak dan perdagangan anak. Kasus tersebut meningkat, karena sebelumnya yaitu tahun 2011 Unit PPA Polresta Surakarta menangani sebanyak 14 dan pada tahun 2012 sebanyak 11 kasus. Sedangkan pada tindak pidana pencabulan yang berkaitan dengan anak pada tahun 2011 sejumlah 11 kasus, pada tahun 2012 sama dengan tahun 2011 yaitu sejumlah 11 kasus dan pada tahun 2013 sejumlah 7 kasus. Pada tindak pidana persetubuhan yang berkaitan dengan anak, unit PPA Polresta Surakarta mengkategorikannya termasuk tindak pidana pemerkosaan. Kasus yang pernah ditangani oleh Unit PPA Polresta Surakarta pada tahun 2011 sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2012 tidak ada kasus. Tetapi pada tahun 2013 terjadi peningkatan, yaitu sebanyak 8 kasus.<sup>6</sup>

Panjangnya proses peradilan yang dijalani anak pelaku tindak pidana, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka.<sup>7</sup> Si anak yang melakukan kejahatan pada umumnya bukan karena sifat jahatnya, tetapi oleh karena bersifat anak ‘nakal’

---

<sup>6</sup> Data Statistika Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta

<sup>7</sup> Marlina, *Op. Cit*, hal. 12.

saja. Sebab itulah terhadap anak-anak seperti ini harus mendapat perlindungan dan perlakuan khusus pula.<sup>8</sup> Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus diletakkan dalam kerangka perwujudan kesejahteraan anak, bukan pemenuhan prosedural hukum. Oleh sebab itu perlu segera dibangun sistem peradilan anak yang terpisah dengan peradilan umum. Peradilan anak diperjuangkan karena spesifik dan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perlindungan anak memiliki nilai progresif yang apa pun kondisinya akan berpengaruh terhadap integrasi masyarakat dan kemajuan peradaban negara. Untuk itu, negara harus segera membuat keputusan pasti bahwa di Indonesia tidak mengenal hukum pidana bagi anak Indonesia karena menghukum anak yang melanggar hukum cukup dengan tindakan.<sup>9</sup>

Berbagai persoalan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia khususnya tindak pidana kesusilaan, menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis memilih judul penelitian dengan judul: **PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN PELAKU DAN KORBAN ANAK DI SURAKARTA.**

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Pembatasan masalah pada penelitian diperlukan agar pembahasan lebih terfokus. Pembatasan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*, Jakarta: PT Sofmedia, hal. 7.

<sup>9</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia, hal. 230.

1. Mengkaji tindak pidana pencabulan dan tindak pidana persetubuhan dengan pelaku dan korban anak.
2. Proses penyelesaian yang akan penulis teliti berupa proses penanganan perkara dari Kepolisian sampai dengan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

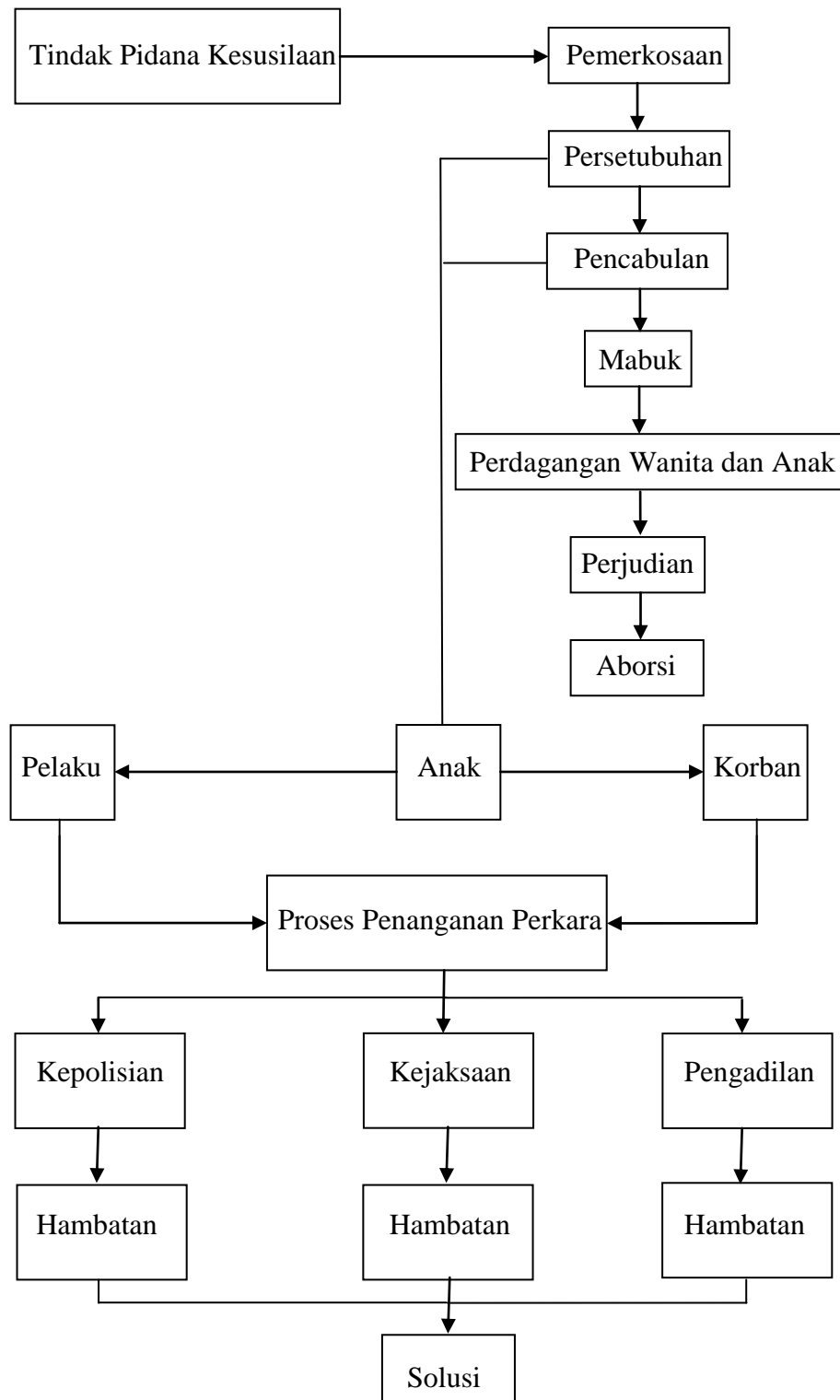
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta.

Selain memiliki tujuan, dalam suatu penelitian pasti ada manfaat-manfaat yang diharapkan oleh penulis setelah melakukan penelitian. Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di masa yang akan datang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian ilmu hukum yang sejenis, khususnya terkait proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak, di masa yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban, gambaran dan informasi atas permasalahan-permasalahan yang diteliti.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada tujuh macam yaitu, tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana persetubuhan, tindak pidana pencabulan, mabuk, perdagangan wanita dan anak, perjudian dan aborsi. Proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan mempunyai perbedaan penanganan oleh aparat penegak hukum. Apalagi bila pelaku dan korban tindak pidana tersebut adalah anak.

Polisi, jaksa dan hakim dalam pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana pencabulan dan tindak pidana persetubuhan dengan pelaku dan korban anak harus mengutamakan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat hak-hak khusus kepada anak pada saat proses peradilan. Dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian tentu ada perlakuan khusus kepada korban dan pelaku anak, tuntutan dari Kejaksaan hingga jalannya sidang yang tertutup untuk umum di Pengadilan Negeri.

Terkait proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak, tentunya para aparat penegak hukum mempunyai kendala dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Baik kendala secara teknis maupun non-teknis. Sehingga perlu dicari solusi untuk meminimalisir bahkan menghilangkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana pencabulan dan tindak pidana persetubuhan dengan pelaku dan korban anak.



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.<sup>10</sup> Penelitian ini menjelaskan proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana pencabulan dan tindak pidana persetubuhan dengan pelaku dan korban anak dari Kepolisian, berlanjut ke Kejaksaan hingga ke Pengadilan di Surakarta.

### 2. Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, dengan uraiannya sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>11</sup> Dalam hal ini sumber pertama yang dimaksud adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta.
- b. Data Sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>12</sup> Fungsi dari data sekunder adalah untuk mendukung data primer. Data sekunder meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

---

<sup>10</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dalam Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 10.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 12.

<sup>12</sup> *Loc. Cit.*

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

### 3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.<sup>13</sup> Penggunaan metode pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana ketentuan yuridis yang mengatur tentang langkah-langkah aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam menangani tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana pencabulan dan persetubuhan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan untuk memperoleh data primer secara akurat. Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Polresta Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut adalah:

- a. Lokasi penelitian yang tidak jauh dari tempat tinggal penulis;
- b. Lokasi tersebut merupakan sumber data primer dalam penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum

---

<sup>13</sup> Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, dalam *Ibid*, hal. 32.

selalu bertolak dari premis normatif.<sup>14</sup> Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>15</sup> Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan petugas Kepolisian Polresta Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta demi mendapatkan data primer secara akurat.

6. Teknik Analisis Data

Data dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan pada kesimpulan.

## F. Sistematika Skripsi

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana kesusilaan, tinjauan umum tentang anak dan

---

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 68.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 57.

anak yang berhadapan dengan hukum dan tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu mengenai proses penanganan perkara, faktor-faktor penghambat, serta upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta.

Bab IV Penutup, pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah secara singkat, kemudian diakhiri dengan saran-saran berdasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.